



DINAS PERIKANAN

ALAMAT KANTOR



TAHUN 2024



Nama Organisasi : DINAS PERIKANAN
Unit Kerja : PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Alamat Kantor : Gedung Dinas Otonom Walikota Jayapura Lantai 2
Jalan Balai Kota No. 1 Entrop
Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura
Provinsi Papua

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA



MATHEYS. SIBI, S.ST.PI, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 19770131 200212 1006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2023

Dinas Perikanan Kota Jayapura



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 dapat di selesaikan tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini dengan tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dan dapat berguna sebagai informasi bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Jayapura, Desember 2023
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2023, yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Jayapura menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Capaian indikator sasaran strategis Pertama, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan, Tangkap terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan nilai 106,60 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Capaian indikator sasaran strategis Ke-dua, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan, Budidaya terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan nilai 101,35 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Capaian indikator sasaran strategis Ke-tiga, yaitu Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan nilai 228,22 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Capaian indikator sasaran strategis Ke-empat, yaitu Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan masyarakat dengan nilai 81 % atau Nilai BAIK dengan interpretasi SANGAT TINGGI

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian keempat sasaran strategis tersebut, Indikator Kinerja Utama 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Bahkan sasaran strategis satu, dua dan tiga telah melampaui target Renstra 2023-2026.

Realisasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut ;

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 1 (Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap) adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pagu Rp. 4.742.015.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.736.109.330,00 (99,88%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2 (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya) adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pagu Rp. 3.802.985.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.795.777.728, 00 (99,81%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 3 (Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan) adalah Program Pengolahan Dan pemasaran Hasil Perikanan, Pagu Rp. 1.515.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.514.281.528,00 (99,95%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 4 (Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat) adalah Seluruh program/kegiatan pencapaian sasaran 1,2 dan 3 ditambah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Pagu Rp. 558.100.000,00 Realisasi Rp. 554.134.288,00 atau 99,29%) Pagu Rp. 10.618.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.600.302.874,00 (99,83%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Gambaran Umum Organisasi 2
	1.2. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi 10
	1.3. Sistematika Penulisan 12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 13
	2.1. Rencana Strategis 13
	2.2. Program dan Kegiatan 17
	2.3. Perjanjian Kinerja 22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 28
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi 28
	3.2. Realisasi Anggaran 57
BAB IV	PENUTUP 58
LAMPIRAN		
-	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
-	Perjanjian Kinerja (PK)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Jenis Eselon Jabatan	5
Tabel 2	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	5
Tabel 3	Data Pegawai Berdasarkan Usia	6
Tabel 4	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel 5	Data Pegawai Menurut Golongan	7
Tabel 6	Data Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan Struktural	7
Tabel 7	Peralatan dan Mesin Pendukung Operasioanal	8
Tabel 8	Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasioanal	8
Tabel 9	Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan	15
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan	16
Tabel 11	Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan	16
Tabel 12	Struktur Program dan Kegiatan Serta Dukungan Anggaran Terkait Langsung Pencapaian Sasaran	20
Tabel 13	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Serta Dukungan Anggaran Pencapaian Sasaran Dinas	21
Tabel 14	Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023	23
Tabel 15	Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023 (Perubahan)	26
Tabel 16	Skala Pengukuran Evaluasi Keberhasilan	29
Tabel 17	Capaian Kinerja Utama dan Metaindikator	30
Tabel 18	Capaian Kinerja sasaran Strategis peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	31
Tabel 19	Jumlah dan Jenis Ikan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	32

Tabel 20	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023	32
Tabel 21	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah dan jenis Ikan	33
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra 2023-2026	34
Tabel 23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan Target Nasional	34
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	35
Tabel 25	Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap tahun 2023	36
Tabel 26	Analisis Program Kegiatan penunjang Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	38
Tabel 27	Capaian Kinerja sasaran Strategis peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023	39
Tabel 28	Jumlah dan Jenis Ikan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023	40
Tabel 29	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan Tahun 2023	40

Tabel 30	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah dan jenis Ikan	41
Tabel 31	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra 2023-2026	42
Tabel 32	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 dan Target Nasional	42
Tabel 33	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023	43
Tabel 34	Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023	44
Tabel 35	Analisis Program Kegiatan penunjang Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023	45
Tabel 36	Capaian Kinerja sasaran Strategis peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023	46
Tabel 37	Jumlah dan Jenis Ikan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023	47
Tabel 38	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2023	47
Tabel 39	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah dan jenis Olahan	48

Tabel 40	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra 2023-2026	49
Tabel 41	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023 dan Target Nasional	49
Tabel 42	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023	50
Tabel 43	Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2023	51
Tabel 44	Analisis Program Kegiatan penunjang Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023	52
Tabel 45	Capaian Kinerja sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat tahun 2023	54
Tabel 46	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra 2023-2026	55
Tabel 47	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023	55
Tabel 48	Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat tahun 2023	56

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH QKJIP DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

Tabel 49	Analisis Program Kegiatan penunjang Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023 Tahun 2023	57
Tabel 50	Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023	58

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jayapura tahun 2023-2026, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja bidang Perikanan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 ini memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan. LKjIP ini disusun mengikuti prinsip-prinsip dasar suatu laporan kinerja, yaitu disusun secara jujur, obyektif dan transparan, yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LKjIP ini juga sekaligus berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi sejauhmana tingkat capaian tujuan dari strategi pembangunan perikanan di Kota Jayapura berdasarkan indikator-indikator kinerja, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tahun 2023, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026. Dan untuk mencapai Sistim AKIP Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan selaku

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1) Susunan Organisasi

Dinas Perikanan Kota Jayapura merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Perikanan khususnya dalam wilayah Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Perikanan seperti yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jayapura nomor 31 Tahun 2016 tersebut adalah :

1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi dibidang perikanan;
3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perikanan;
4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang perikanan;
5. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan;
6. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya perikanan;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan;
8. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perikanan Kota Jayapura mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

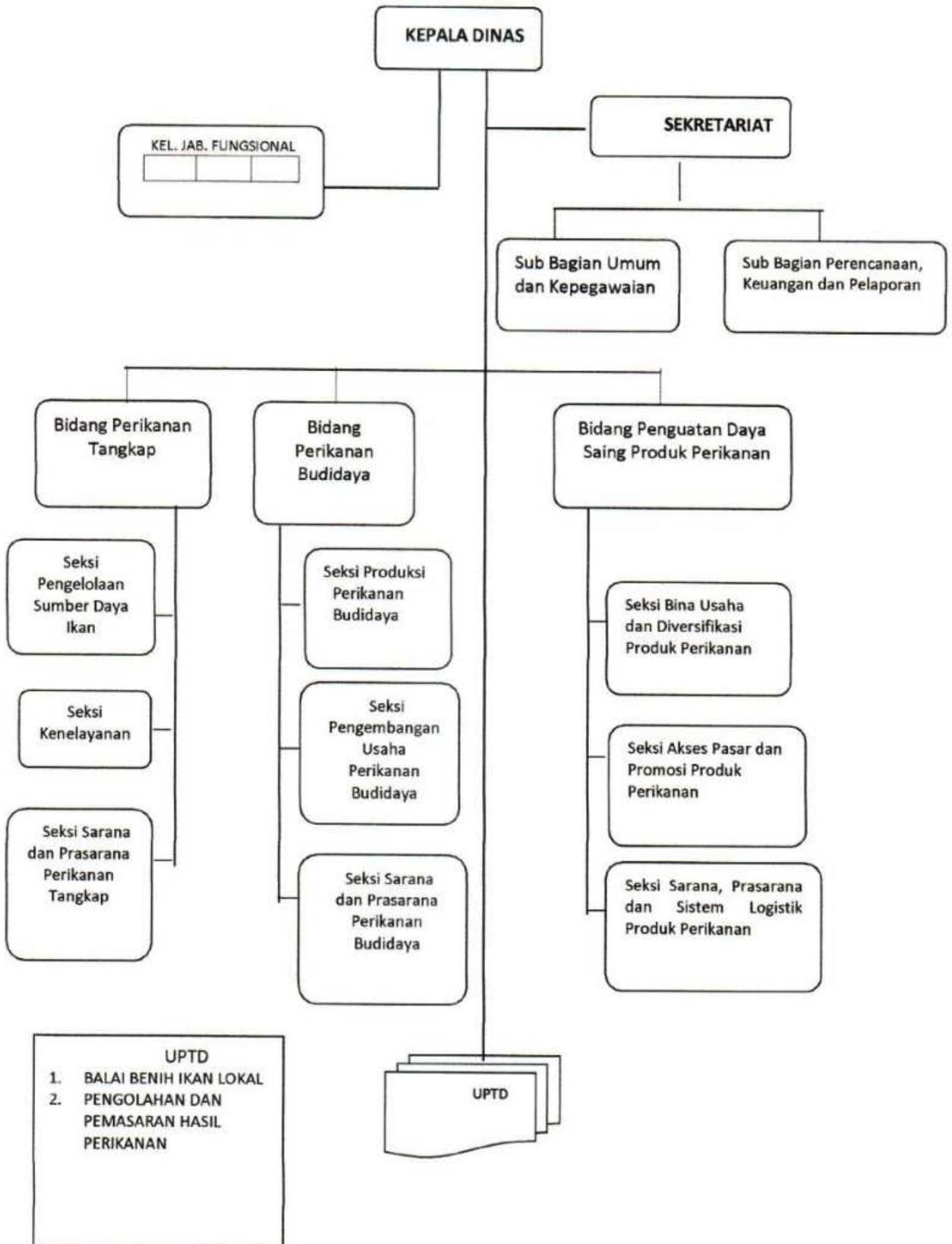
- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Kenelayanan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
 - 2. Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Sistem Logistik Produk Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun penjelasan tentang pejabat tersebut adalah:

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- c. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- d. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- f. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

Selanjutnya bagan struktur Dinas Perikanan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016



2) Sumberdaya Manusia (SDM)

Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adatif, responsif, tanggap dan aspiratif. Guna memperlancar tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kota Jayapura didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 38 orang PNS Daerah, 1 orang Penyuluh Kementrian kelautan dan Perikanan RI, 1 orang Penyuluh Perikanan Bantu KKP RI dan 3 orang tenaga kontrak (data per Desember 2023). Berdasarkan susunan organisasi tersebut terdapat jabatan struktural dan fungsional yang ada di Dinas Perikanan, yang terdiri dari:

Tabel 1. Jumlah jenis Eselon Jabatan di Dinas Perikanan Tahun 2023

No.	Jenis Eselon Jabatan	Jumlah	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II B	1 orang	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III A	1 orang	1 orang	Sekretaris
3.	Eselon III B	3 orang	2 orang	Kepala Bidang
4.	Eselon IV A	13 orang	13 orang	Kepala Seksi/Kasubag/ Kepala UPT
5.	Eselon IV B	2 orang	1 orang	Kepala TU UPT
Jumlah		20 orang	18 orang	

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 20 eselon jabatan yang ada di Dinas Perikanan yang terisi hanya 18 eselon jabatan. Dua jabatan lainnya kosong karena pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin sesuai jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

JABATAN	JENIS KELAMIN		Jumlah (Orang)
	Laki-laki	Perempuan	
Kepala Dinas	1		1
Sekretaris		1	1
Kepala Bidang	1	1	2
Kasubag/Kasie/UPT	7	7	14
Staf	9	10	19
Penyuluh KKP		1	1
TOTAL	18	20	38

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Optimalisasi pegawai di Dinas Perikanan Kota Jayapura diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dikarenakan jumlah pegawai yang laki-laki dan perempuan hampir seimbang dan mayoritas pegawai berada pada usia produktif yakni pada rentang 25 - 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Pegawai berdasarkan usia

USIA (tahun)	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (Orang)
25 - 35	3	6	9
36 - 45	12	10	22
46 - 56	2	5	7
TOTAL	17	20	38

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Keadaan Pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan sesuai Jabatan

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				Jumlah (orang)
	S2	S1/D.IV	D.II/D.III	SMU/SMK	
Kepala Dinas	1				1
Sekretaris	1				1
Kepala Bidang	1	1			2
Kasubag/Kasie/UPT	1	10	3		14
Staf		7	2	10	19
Penyuluh KKP		1			1
TOTAL	4	19	5	10	38

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada dilingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan prosentase 60,52 % berpendidikan S1 dan S2. Di tahun 2023 ini 4 (empat) orang pegawai mengambil kuliah S2, dan 4 (empat) orang sedang menyelesaikan kuliah S1. Diharapkan prosentase ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan SDM di Dinas Perikanan Kota Jayapura.

Dilihat dari Golongan, pegawai di Dinas Perikanan Kota Jayapura, sebagaian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebanyak 23 orang (60,52%). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Pegawai menurut Golongan sesuai Jabatan

JABATAN	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (orang)	Jumlah (orang)
Kepala Dinas	1			1
Sekretaris	1			1
Kepala Bidang	2	1		2
Kasubag/Kasie/UPTD		13		14
Staf		9	10	19
Penyuluh KKP	1			1
TOTAL	5	23	10	38

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Perkembangan Pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura berdasarkan diklat perjenjangan struktural dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Data Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural

JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah (orang)
Kepala Dinas		1		1
Sekretaris		1		1
Kepala Bidang		1	1	2
Kasubag/Kasie/UPTD			3	3
TOTAL		3	4	7

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

3) Sumber Daya Sarana Prasarana Pendukung

a) Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Dalam melaksanakan aktifitas rutin, Dinas Perikanan menempati Gedung Otonom Lantai 2 Kantor Walikota Jayapura.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan perkantoran yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perikanan, antara lain :

Tabel.7 Peralatan dan Mesin (Sarana Perkantoran) Pendukung Oprasional

NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
Meja 1 biro	11
Meja ½ biro	45
Meja Rapat	1
Kursi Putar	10
Kursi Kerja	49
Kursi Rapat	38
Lemari Arsip/data	21
Kursi Sofa	2
Papan Data	12
Laptop	13
Printer	9
Proyektor LCD	1
Komputer PC lengkap	7
Wireless	1
AC Split	4
Kipas Angin	13
Brankas	1
Genset	1
TV Smart	2

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2023

b) Sarana Mobilitas

Kendaraan dinas yang digunakan sebagai sarana operasional, seluruhnya dalam kondisi baik dan mencukupi untuk menunjang operasional dinas dalam berbagai kegiatan lapangan.

Tabel 8. Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional Dinas, 2023

JENIS KENDARAAN	JUMLAH (unit)	SUMBER DANA	KONDISI	KET.
Roda Empat				
1. Toyota Innova	1	APBD (DAU)	Baik	Asset Daerah
2. Toyota (Kijang/Pic up)	1	APBD (DAK/DAU)	Rusak Berat	Asset Daerah
3. Isuzu (Panther/Pick up)	1	APBD (DAK/DAU)	Rusak Berat	Asset Daerah
4. Toyota (Hailux/Pick up)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
5. Suzuki (APV Luxury)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
Roda Dua				
1. Honda (GL Max)	3	APBD (DAK/DAU)	Rusak Berat	Asset Daerah
2. Honda (Tiger)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
3. Honda (New Tiger)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
4. Honda (Supra X)	1	APBD (DAU)	Baik	Asset Daerah
5. Honda (Supra X 125)	8	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
6. Honda (Vario 125)	2	APBD (DAK/DAU)	1 Rusak Berat	Asset Daerah
7. Honda (Supra Vit)	1	APBN	Rusak	Aset Pusat
8. Yamaha (Vega R)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
9. Yamaha (New Vixion)	2	APBD(DAK/DAU)	1 unit Baik 1 unit Hilang	Asset Daerah

Sumber : Dinas Perikanan, tahun 2023

Selain sarana kendaraan/transportasi darat, juga terdapat sarana transportasi laut sebagai penunjang kegiatan lapangan, berupa 1 unit speedboat

4) Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan upaya pelayanan di bidang perikanan diperlukan pembiayaan yang memadai. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.00/DPA-OPD/KOTA-JPR/2023 tanggal 9 Januari 2023, Alokasi Anggaran Dinas perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 tidak termasuk Gaji PN, adalah sebesar Rp. 10.460.000.000,00 (Sepuluh Milyard Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Dari Anggaran tersebut alokasi anggaran pembangunan adalah sebesar Rp. 10.060.000.000,00 (Sepuluh Milyard Enam Puluh Juta Rupiah) Atau 99,015 %, sedang alokasi anggaran penunjang adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 Selanjutnya, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.0000/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2023 tanggal 3 Oktober 2023 maka Alokasi Anggaran Dinas perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 tidak termasuk Gaji PNS menjadi sebesar Rp. 10.918.100,00. Peningkatan alokasi anggaran adalah pada alokasi anggaran

pembangunan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pada Anggaran Rutin sebesar Rp. 158.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Diharapkan pada tahun - tahun berikutnya alokasi anggaran di Dinas Perikanan Kota Jayapura agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bidang perikanan di Kota Jayapura.

1.2 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi

Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan terkait tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD Kota Jayapura 2023-2026. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Permasalahan utama yang merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Jayapura adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perikanan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Kota Jayapura merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan serta meningkatkan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan, terhadap perekonomian daerah. Namun, kontribusi sub sektor perikanan masih minim dibandingkan sektor jasa yang masih dominan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Jayapura.

Sebagai sektor pendukung dalam menopang perekonomian Kota Jayapura, sektor perikanan harus terus didorong. Belum optimalnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan antara lain oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan.

Hasil rumusan permasalahan terkait pembangunan perikanan di Kota Jayapura dapat dipetakan sebagai berikut :

- Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan

dan Perikanan dari kabupaten/Kota. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan, dimana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenangan pun kepada Kabupaten/Kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai pada tingkat Provinsi. Sedangkan pihak Kabupaten/Kota tetap harus menangani permasalahan yang timbul diwilayahnya;

- Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha perikanan;
- Konversi Lahan, Mangrove dan Potensi pencemaran perairan yang cukup tinggi.
- Masih rendahnya SDM pelaku usaha perikanan (kemampuan manajerial dan teknis) dalam mengembangkan usahanya sesuai standart mutu yang ditetapkan;
- Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh perikanan, sehingga sangat mempengaruhi kontiyuitas pendampingan.
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan lembaga perbankan dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha
- Tingkat sedimentasi Bendungan Tami yang tinggi dan jadwal normalisasi yang tidak mengikuti jadwal produksi mempengaruhi usaha budidaya perikanan air tawar.
- Ketersediaan induk unggul dan air bersih di BBIL yang kurang optimal di BBIL mengakibatkan produksi induk unggul kurang optimal.
- Fungsi kelembagaan perikanan belum optimal.

Adapun permasalahan yang menjadi isu prioritas untuk ditangani ditahun 2023 adalah:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pengembangan usaha perikanan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya;
- Masih rendahnya SDM pelaku usaha perikanan (kemampuan manajerial dan teknis) dalam mengembangkan usahanya sesuai standart mutu yang ditetapkan;
- Kualitas kelembagaan pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah secara umum masih rendah.
- Masih terbatasnya akses pelaku usaha perikanan ke permodalan dan teknologi;
- Ketersediaan induk unggul yang mampu menghasilkan benih yang unggul sangat terbatas.

1.3. Sistematika Penulisan

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2023 terdiri dari 4 bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*)
- Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini mengemukakan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi (capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan)
- Bab IV Penutup
Pada bab ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Rencana Strategis

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 maka seluruh Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Jayapura menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2023-2026.

Memasuki tahun 2023 Dinas Perikanan Kota Jayapura menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jayapura tahun 2023-2026 dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Jayapura.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2018-2022).

RPD Pemerintah Kota Jayapura merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perikanan memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perikanan Kota Jayapura yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jayapura nomor 01 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Jayapura, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perikanan Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Perikanan Kota Jayapura ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan isu strategis dan arah kebijakan RPD Kota Jayapura sebagai gambaran kontribusi Dinas Perikanan mewujudkan pembangunan perikanan di Kota Jayapura. Tujuan dan sasaran merupakan impac dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang tiga tahun ke depan. Impac tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan perikanan di Kota Jayapura. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Jayapura periode 2023-2026 adalah “Meningkatnya kontribusi sector pertanian dan kelautan”

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Jayapura Kinerja RPD disajikan dalam Tabel 8 berikut ini :

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan, 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
			2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	43.500,00	44.152,50	44.814,79	45.487,01	45.487,01
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	13.500,00	13.635,00	13.771,35	13.909,06	13.909,06
3	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	1.045,12	1.097,38	1.152,25	1.209,85	1.209,85
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00

Sumber : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perikanan Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Nomor 523/08/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2023, yang dalam perjalanannya mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/684.1/IX/2023 tanggal 29 September 2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 . Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 dan Perubahannya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	FORMULASI
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Persentase Laju Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	0,86	$(\text{Jumlah produksi tangkap tahun ini} - \text{Jumlah produksi tangkap tahun lalu}) / (\text{Jumlah produksi tangkap tahun lalu}) \times 100$
	Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase Laju Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	5,98	$(\text{Jumlah produksi budidaya tahun ini} - \text{Jumlah produksi budidaya tahun lalu}) / (\text{Jumlah produksi budidaya tahun lalu}) \times 100$
	Peningkatan Produktivitas Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Laju Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	persen	2,97	$(\text{Jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun ini} - \text{Jumlah produksi olahan perikanan tahun lalu}) / (\text{Jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun lalu}) \times 100$
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80,00	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN)	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	FORMULASI
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	43.500,00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun - n
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	13.500,00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun - n
	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	1.045,12	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun - n
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang

Sumber : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategi diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan pelaku usaha perikanan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas perikanan sebagai berikut :

Tabel 11. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	1 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1 Meningkatkan Produksi perikanan budidaya berbasis komoditi unggulan	1 Pengembangan infrastruktur pendukung dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
			2 Penerapan aplikasi teknologi budidaya perikanan tepat guna
			3 Peningkatan SDM pembudidaya dan pedampingan usaha perikanan
			4 Peningkatan penerapan aturan perikanan
			5 Penyediaan Data dan Informasi perikanan budidaya
	2 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan	6 Revitalisasi armada dan penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap
			7 Penerapan aplikasi teknologi perikanan tangkap tepat guna
			8 Peningkatan SDM nelayan serta pedampingan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap
			9 Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap yang ramah lingkungan
			10 Penyediaan Data dan Informasi perikanan tangkap
	3 Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	3 Meningkatkan Produksi Olahan dan Logistik Hasil Perikanan	11 Peningkatan pengawasan dan pengendalian keamanan produk hasil perikanan
			12 Peningkatan sistem logistik hasil perikanan
13 Peningkatan diversifikasi, promosi dan akses pasar produk perikanan			
14 Peningkatan kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran perikanan			
15 Peningkatan sistem pembinaan mutu produk perikanan			
16 Peningkatan SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui pedampingan usaha			
17 Penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan			
18 Penyediaan Data dan Informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			
4 Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat	4 Meningkatkan angka indeks kepuasan masyarakat	19 Pemberikan kemudahan layanan bagi pelaku usaha perikanan	

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2023 Program Pembangunan perikanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Jayapura disusun sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dengan anggaran APBD Kota Jayapura dan didukung anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Perikanan dan Kelautan.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan MENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2023 adalah :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program ini adalah peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan
- 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 4) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

3. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Diusahakan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 5) Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran Sampai Dengan 10 GT

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Tangkap (PT).

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tujuan program ini adalah peningkatan produksi perikanan budidaya berbasis komoditi unggulan daerah, dengan sasaran meningkatnya volume (kuantitas), mutu (kualitas) dan nilai (value) produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

4. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
Sub Kegiatan :
 - 6) Pemberiaan Pedampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
5. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan :
 - 7) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - 9) Pembinaan dan Pemantauan pembudidaya Ikan di Darat

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Budidaya (PB).

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program ini adalah peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura, dengan sasaran meningkatnya volume (*quantity*), mutu (*quality*) dan nilai (*value*) produk olahan unggulan daerah serta peningkatan akses pemasaran hasil perikanan,. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Sub Kegiatan :
 - 10) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Sub Kegiatan :
 - 11) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
8. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

- 12) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- 13) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSP2), dan

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program pendukung pencapaian sasaran 1-3

Selanjutnya, struktur program dan kegiatan serta dukungan anggaran terkait langsung pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.00/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2023 Tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Struktur Program dan Kegiatan Serta Dukungan Anggaran Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.955.015.000,00	
	1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di	4.855.015.000,00	
	1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000,00	DBH
	1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.413.853.000,00	DAK, OTSUS
	1.3 Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	1.391.162.000,00	DAK, OTSUS
	2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam	50.000.000,00	
	2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000,00	DBH
	3. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar	50.000.000,00	
	3.1 Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	50.000.000,00	DBH
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.589.985.000,00	
	1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	50.000.000,00	
	1.1 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	50.000.000,00	DBH
	2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.539.985.000,00	
	1.3 Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	DBH
	1.4 Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.454.985.000,00	OTSUS, DAK
	1.5 Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	50.000.000,00	DBH

Bersambung pada halaman berikut :

Sambungan dari halaman sebelumnya

SASARAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.215.000.000,00	
	1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha	35.000.000,00	
	1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	DBH
	2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil	80.000.000,00	
	1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	80.000.000,00	DBH
	3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	1.100.000.000,00	
	1.3 Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	OTSUS, DAK
1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DBH	

Berdasarkan DPA Perubahan No. 3.25.0.00.0.00.02.00/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Pada Program Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, khususnya sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, terdapat perubahan anggaran yakni mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Anggaran ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pengendalian inflasi daerah melalui pasar murah.

Sedangkan struktur program dan kegiatan pendukung serta dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2023 sebelum dan sesudah Perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.00/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Serta Dukungan Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
Meningkatnya Pelayanan Prima pada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.956.759.000	4.992.110.000	DTU-DAU
	1. Administrasi keuangan Perangkat Daerah			
	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.556.759.000	4.467.110.000	-89.649.000
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1.2 Pengadaan Pakaian Dinas	48.000.000	48.000.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1.3 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	26.000.000	26.000.000	0
	1.4 Penyediaan peralatan rumah tangga	13.007.400	15.662.400	2.655.000
	1.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.344.300	160.642.300	60.298.000
	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.548.300	16.595.300	8.047.000
	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	3.000.000	3.000.000	0
	1.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.900.000	230.900.000	54.000.000
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1.7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	11.700.000	11.700.000	0
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1.8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	4.000.000	4.000.000	0
	1.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	8.500.000	8.500.000	0
	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG TERCAPAINYA SASARAN 1-3	4.956.759.000	4.992.110.000	35.351.000

Untuk program/kegiatan pendukung tercapainya sasaran I dan II, jumlah anggaran setelah perubahan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 158.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Perikanan Kota Jayapura telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Persentase Laju Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	0,86
Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase Laju Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	5,98
Peningkatan Produktivitas Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Laju Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	persen	2,97
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80,00
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perkantoran	Jumlah urusan	Urusan	6
Merumuskan kebijakan pengelolaan UPTD	Jumlah petunjuk teknis pengelolaan UPTD	Dokumen	2
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	Nilai	72

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.955.015.000	DAK (42,48), DBH (3,03%), OTSUS (54,49%)
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.589.985.000	DAK (60,03%), DBH (3,76%), OTSUS (36,21%)
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.215.000.000	DBH (17,70%), OTSUS (82,30%)
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	DAU (100%)
JUMLAH		10.160.000.000	DAU (3,94%), DBH (4,92%), DAK (41,93%), OTSUS (49,21%)

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	43.500 Ton	4.955.015.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah RTN yang melakukan pengelolaan penangkapan ikan		4.855.015.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (data produksi, jumlah nelayan, armada dan alat tangkap)	5 laporan	50.000.000,00	Kasie. Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.Pi)
1.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya prasarana usaha perikanan tangkap yang memenuhi standar mutu	46 unit	3.413.853.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmilka I, S.Pi)
1.3 Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah bantuan sarana usaha perikanan tangkap	607 unit	1.391.162.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmilka I, S.Pi)
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam datrah Kabupaten/Kota			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
2.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	a. Jumlah kelompok nelayan yang terbentuk	7 kelompok	50.000.000,00	Kasie Kenelayanan (Jhon Banti, S.Pi)
	b. Jumlah nelayan yang memiliki sertifikasi kecakapan nelayan	30 nelayan		
	c. Jumlah KUSUKA yang diterbitkan	200 Kartu		
	d. Jumlah Rekomendasi BBM yang diterbitkan	169 Rekomendasi		
3. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
3.1 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	10 dokumen	50.000.000,00	Kasie. Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.Pi)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.370,49 Ton	3.589.985.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.Pi)
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.Pi)
1.1 Pemberian Pendampingan, kemudahan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah UPR terbina	14 UPR	50.000.000,00	Ka. UPTD BBIL (Herman Koyari, S.Pi)
	Jumlah produksi benih ikan	150.000 benih		
	Jumlah produksi calin	6 paket		
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.539.985.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.Pi)
1.3 Penyediaan data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data statistik perikanan budidaya (data produksi pembesaran, jumlah pembudidaya, luas lahan dan produksi benih ikan air tawar)	5 laporan	35.000.000,00	Kasie Produksi Budidaya (Yoppy Merahabia, S.Pi)
1.4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	21 unit	3.454.985.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Budidaya (Agustinus Abisay, S.Pi)
1.5 Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah pembinaan, pemantauan dan monitoring usaha pembudidayaan ikan	30 kali	50.000.000,00	Kasie Pembinaan Usaha Budidaya Perikanan (Mersiana Mebri, A.Md.Pi)
	Jumlah kelompok yang terbentuk	3 kelompok		
	Jumlah kelompok yang terlatih	5 kelompok		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PASU ANGGARAN TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1.045,12 Ton	1.215.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agussalim, S.PI)
	angka konsumsi ikan Kota Jayapura	44 kg/kapita/thn		
1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi			35.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agussalim, S.PI)
1.1 Penyediaan Data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	26 laporan	35.000.000,00	Kasie Akses Pasar dan Promosi Hasil Perikanan
	Jumlah promosi GEMARIKAN	3 kali		
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha			80.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agussalim, S.PI)
1.2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengendalian mutu produk perikanan	1 kali	80.000.000,00	Kasie Bina Mutu (Alfarida. P. S.PI)
	Jumlah UPI yang dibina	36 UPI		
	Jumlah UPI tersertifikasi	6 UPI		
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan			1.100.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agussalim, S.PI)
1.3 Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarana pengolahan bagi UPI	66 unit	1.000.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agussalim, S.PI)
	Jumlah UPI penerima bantuan prasarana pengolahan sesuai standar	3 UPI		
1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi logistik hasil perikanan	20 Ton	100.000.000,00	Ka. UPTD Outlet P2HP (Stenly, S.ST.PI)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72	441.350.000,00	Kadis Perikanan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan yang optimal			
1.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	39 orang	4.041.350.000,00	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian			
2.1 Pengadaan pakaian dinas	Jumlah paket pakaian dinas PNS	35 Paket	12.495.000,00	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum yang optimal			
3.1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	3 paket	24.258.000,00	
3.2 penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	125.000.000,00	
3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	3 paket	4.923.000,00	
3.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan penundangan yang	1 paket	3.000.000,00	
3.5 Penyediaan bahan/bahan material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 paket	2.576.000,00	
3.6 Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah paket konsumsi fasilitasi kunjungan tamu	180 paket	20.280.000,00	
3.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	5 laporan	140.604.000,00	
4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya penyediaan jasa			
4.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	2 paket	13.134.000,00	
4.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	3 orang	52.350.000,00	
5. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1 Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah service peralatan dan mesin kantor	2 kali	1.380.000,00	

Selanjutnya, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.00/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2023 Tanggal 3 Oktober 2023, maka dilakukan perubahan pada indikator kinerja (menyesuaikan dengan indikator Rencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura tahun 2023-2026, Peraturan Walikota Jayapura No. 30 Tahun 2022) dan jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Perikanan, sebagai berikut;

Tabel 15. Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 Setelah DPA Perubahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	persen	43.500,00
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	persen	13.500,00
Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	persen	1.045,12
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80,00
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perkantoran	Jumlah urusan	Urusan	6
Merumuskan kebijakan pengelolaan UPTD	Jumlah petunjuk teknis pengelolaan UPTD	Dokumen	2
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	Nilai	72

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.955.015.000	DAK (42,48), DBH (3,03%), OTSUS (54,49%)
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.589.985.000	DAK (60,03%), DBH (3,76%), OTSUS (36,21%)
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.515.000.000	DBH (14,19 %), OTSUS (66,01%), DAU-DTU (19,80%)
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	558.100.000	DAU (100%)
JUMLAH		10.618.100.000	DAU (5,26%), DBH (7,53%), DAK (40,12%), OTSUS (47,08%)

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
Penyelenggaraan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	43.500 Ton	4.955.015.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1. Penyelenggaraan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah RTN yang melakukan pengelolaan penangkapan ikan		4.855.015.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (data produksi, jumlah nelayan, armada dan alat tangkap)	5 laporan	50.000.000,00	Kasie. Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.PI)
1.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya prasarana usaha perikanan tangkap yang memenuhi standar mutu	46 unit	3.413.853.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmilka I, S.PI)
1.3 Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah bantuan sarana usaha perikanan tangkap	607 unit	1.391.162.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmilka I, S.PI)
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
2.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	a. Jumlah kelompok nelayan yang terbentuk	7 kelompok	50.000.000,00	Kasie Kenelayanan (Jhon Banti, S.PI)
	b. Jumlah nelayan yang memiliki sertifikasi kecakapan nelayan	30 nelayan		
	c. Jumlah KUSUKA yang diterbitkan	200 Kartu		
	d. Jumlah Rekomendasi BBM yang diterbitkan	169 Rekomendasi		
3. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
3.1 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	10 dokumen	50.000.000,00	Kasie. Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.PI)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.370,49 Ton	3.589.985.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.PI)
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			50.000.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.PI)
1.1 Pemberian Pendampingan, kemudahan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah UPR terbina	14 UPR	50.000.000,00	Ka. UPTD BBIL (Herman Koyari, S.PI)
	Jumlah produksi benih ikan	150.000 benih		
	Jumlah produksi calon	6 paket		
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.539.985.000,00	Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.PI)
1.3 Penyediaan data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data statistik perikanan budidaya (data produksi pembesaran, jumlah pembudidaya, luas lahan dan produksi benih ikan air tawar)	5 laporan	35.000.000,00	Kasie Produksi Budidaya (Yopy Merahabia, S.PI)
1.4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	21 unit	3.454.985.000,00	Kasie Sarpras Perikanan Budidaya (Agustinus Abisay, S.PI)
1.5 Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	Jumlah pembinaan, pemantauan dan monitoring usaha pembudidayaan ikan	30 kali	50.000.000,00	Kasie Pembinaan Usaha Budidaya Perikanan (Mersiana Mebri, A.Md.PI)
	Jumlah kelompok yang terbentuk	3 kelompok		
	Jumlah kelompok yang terlatih	5 kelompok		

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1.045,12 Ton	1.219.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agusallim, S.Pi)
	angka konsumsi ikan Kota Jayapura	44 kg/kapita/thn		
1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi			35.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agusallim, S.Pi)
1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	26 laporan	35.000.000,00	Kasie Akses Pasar dan Promosi Hasil Perikanan
	Jumlah promosi GEMARI KAN	3 kali		
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha			80.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agusallim, S.Pi)
1.2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengendalian mutu produk perikanan	1 kali	80.000.000,00	Kasie Bina Mutu (Alfarida, P, S.Pi)
	Jumlah UPI yang dibina	36 UPI		
	Jumlah UPI tersertifikasi	6 UPI		
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan			1.100.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agusallim, S.Pi)
1.3 Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarana pengolahan bagi UPI	66 unit	1.000.000.000,00	Kabid PDSPP (M. Agusallim, S.Pi)
	Jumlah UPI penerima bantuan prasarana pengolahan sesuai standar	3 UPI		
1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi logistik hasil perikanan	20 Ton	100.000.000,00	Ka. UPTD Outlet P2HP (Sterly, S.ST.Pi)
	Pelaksanaan Pasar murah pengendalian inflasi	20 kali	300.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72	4.784.032.000,00	Kadis Perikanan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan yang optimal			
1.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	39 orang	4.225.932.000,00	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian			
2.1 Pengadaan pakaian dinas	Jumlah paket pakaian dinas PNS lengkap dengan atribut	35 Paket	12.495.000,00	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum yang optimal			
3.1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	29.292.000,00	
3.2 penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	205.675.000,00	
3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	23.584.200,00	
3.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 paket	3.000.000,00	
3.5 Penyediaan bahan/bahan material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 paket	2.576.000,00	
3.6 Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah paket konsumsi fasilitas kunjungan tamu	180 paket	90.243.000,00	
3.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	5 laporan	140.568.800,00	
4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran			
4.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	2 paket	21.234.000,00	
4.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	3 orang	67.950.000,00	
5. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1 Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah service peralatan dan mesin kantor	2 kali	1.380.000,00	

Perjanjian Kinerja Perubahan di atas, meliputi :

1. Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mengalami perubahan anggaran, karena penambahan anggaran pada Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam upaya pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan pasar murah komoditi perikanan.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Jayapura, mengalami perubahan anggaran dengan bertambahnya anggaran sebesar Rp. 158.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan juta Seratus Ribu Rupiah), diantaranya diperuntukkan bagi Penanganan Stunting di Kota Jayapura.

Tabel 16. Skala Pengukuran Evaluasi Keberhasilan

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	≥ 91 %	Sangat Tinggi
2.	76 - 90,99 %	Tinggi
3.	66 - 75,99 %	Sedang
4.	51 - 65,99 %	Rendah
5.	≤ 50,99%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator kinerja Utama. Pengukuran Kinerja Organisasi diukur berdasarkan tingkat capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Jayapura telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura, terdapat 4 sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura pada tahun 2023 yakni :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya

3. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan, dan
4. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Dinas Perikanan telah menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Nomor 523/08/1/2023 tanggal 12 Januari 2023.

Tabel 17. Capaian Kinerja Utama Dan Metaindikator Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (Persen)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	43.500,00	45.369,70	105,60	SANGAT TINGGI
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	13.500,00	13.684,00	101,36	SANGAT TINGGI
	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	1.045,12	2.385,15	228,22	SANGAT TINGGI
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80	81 (PREDIKAT BAIK)	101,25	SANGAT TINGGI

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.500,00	46.369,70	106,60

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap Kota Jayapura tahun 2023 (46.369,70 ton) telah melebihi target yang ditetapkan yakni 43.500 ton. Capaian kinerja produksi tangkap tahun 2023 yang mencapai 106,60 persen atau dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Dan jika dibandingkan tahun sebelumnya, laju peningkatan produksi tangkap tahun 2023 meningkat 7,5 %.

Peningkatan produksi tangkap tahun 2023, masih didominasi oleh Jenis ikan Tuna (34,47 %), , cakalang (14,05 %) dan tongkol (10,03 %), sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 19. Jumlah dan Jenis Ikan Produksi Tangkap Tahun 2023

No	JENIS IKAN	JUMLAH PRODUKSI TAHUN 2023 (TON)
1	Tuna	15.984,00
2	Cakalang	6.516,30
3	Tenggiri	92,17
4	Bobara	102,02
5	Bawal	87,90
6	Kembung	3.862,93
7	Tongkol	4.651,18
8	Tude	96,22
9	Kawalina	3.177,77
10	Kakap Merah	80,01
11	Salam	1.973,20
12	Deho	2.516,99
13	Mumar	2.846,60
14	Lolosi	88,50
15	Puri	2.385,10
16	Ikan lainnya	1.908,83
JUMLAH		46.369,70

Sumber : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan tangkap antara tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI	
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.129,60	43.500,00	43.131,75	46.369,70

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu), peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Tahun 2022 persentase capaian kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap adalah sebesar 100 persen, dan pada tahun 2023 persentasenya mencapai 106,60 persen. Dan jika dilihat dari kontribusi sektor tangkap terhadap capaian kinerja peningkatan produksi perikanan maka dapat dilihat bahwa dalam perkembangan 2 (dua) tahun terakhir, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan cukup signifikan.

Tabel 21. Perbandingan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan Tahun 2024 Berdasarkan Jumlah dan Jenis Ikan

NO.	JENIS IKAN	PRODUKSI	
		2022	2023
1	Tuna	15.912,20	15.984,00
2	Cakalang	5.934,50	6.516,30
3	Tenggiri	87,47	92,17
4	Bobara (Kuwe)	81,02	102,02
5	Bawal	75,90	87,90
6	Kembung	2.982,73	3.862,93
7	Tongkol	4.629,70	4.651,18
8	Tude	94,12	96,22
9	Kawalina	2.779,51	3.177,77
10	Kakap Merah	74,24	80,01
11	Salam	1.917,21	1.973,20
12	Deho	2.259,47	2.516,99
13	Mumar	2.519,26	2.846,60
14	Lolosi	57,56	88,50
15	Puri	1.977,27	2.385,10
16	Ikan Lainnya	1.749,59	1.908,83
JUMLAH		43.131,75	46.369,72

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

Realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 dan akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	45.487,01	46.369,70	101,94

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada tahun 2023 hasil produksi perikanan tangkap telah melebihi jumlah target akhir Renstra Dinas Perikanan tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, dengan tingkat kemajuan 101,94%.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional**

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 Dan Target Nasional Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET NASIONAL TAHUN 2023	KETERANGAN
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46.369,70	8.730.000,00	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi perikanan tangkap Kota Jayapura menyumbang 0,53 % dari total produksi perikanan tangkap nasional pada tahun 2023.

Namun jika dibandingkan dengan target produksi perikanan tangkap Provinsi Papua tahun 2023 (130.000 ton), jumlah produksi perikanan tangkap Kota Jayapura tahun 2023 menyumbang 35,67 % dari jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Papua.

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*)

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 1 (satu) Dinas Perikanan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	106,60	99,880	6,720

Pada tahun 2023, target anggaran yang digunakan adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 4.742.015.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.736.109.330,00 (99,88%), dengan sisa anggaran Rp. 5.905.670,00 (0,12%).

Dengan demikian, berdasarkan data di atas diketahui bahwa prosentase

capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 adalah 106,60 % dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,88 %. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan sudah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,720

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.500,00	46.369,70	<p>Faktor-faktor yang menyebabkan capaian produksi perikanan tangkap melampaui target yang ditetapkan adalah adanya fenomena El Nino yang terjadi dari Bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023. El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Suhu menjadi yang lebih hangat dari biasanya ini mengakibatkan pengurangan udara basah di wilayah sekitarnya, yang pada akhirnya ikut menaikkan suhu. Di Papua dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Fenomena El Nino ini membawa dampak positif bagi Perairan Papua. Karena pada saat El Nino, di laut terjadi Upwelling. Upwelling sendiri adalah fenomena naiknya air laut dari lapisan dalam yang membawa air laut kaya nutrisi serta suhu lebih dingin ke permukaan.</p> <p>Pasokan nutrisi ke dekat permukaan ini memicu proses fotosintesis yang intensif oleh tumbuhan renik (phytoplankton) sebagai produsen primer di laut. Melimpahnya phytoplankton adalah awal dari rantai makanan di laut, dengan dimangsanya oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama. Rantai makanan tersebut akan berlanjut hingga ke tingkat pemangsaan oleh ikan pelagis besar, seperti tuna dan cakalang.</p> <p>Adanya bantuan pemerintah melalui Dinas Perikanan tahun 2023 baik bantuan prasarana tangkap seperti kapal dan mesin kapal maupun sarana tangkap seperti jaring, pancing, GPS, sarana keselamatan dan rumpon serta perbaikan ekosistem melalui penyediaan fish apartemen sangat andil dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap</p> <p>Kegiatan Pelatihan, Pendampingan dan bimbingan serta monitoring bantuan hibah yang dilakukan secara kontinyu juga ikut mempengaruhi peningkatan jumlah produksi</p> <p>Kemudahan akses yang diberikan kepada nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak melalui pemberian surat rekomendasi per nelayan untuk memenuhi kebutuhan melaut sangat mempengaruhi produktivitas nelayan</p> <p>Semakin meningkatnya jumlah permintaan pasar luar daerah Kota Jayapura akan komoditi Tuna, mendorong distributor dan nelayan umumnya untuk terus meningkatkan produksinya.</p> <p>Faktor lain yang turut mendukung meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah iklim usaha nelayan tangkap yang terus meningkat</p>

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Analisis program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Perikanan, adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 26. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kota Jayapura Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG/PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.500,00	46.369,70	<p>Pencapaian sasaran kinerja 1) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan tangkap yang kemudiang dijabarkan dalam 3 kegiatan :</p> <p>a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemberian bantuan hibah prasarana penangkapan ikan berupa 16 unit motor ketinting, 6 unit motor tempel, 6 unit fish apartment, 14 unit mesin kapal dan 4 unit kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5GT - juga pada pemberian bantuan sarana dan alat bantu penangkapan ikan berupa 60 unit jaring cumi, 69 unit jaring permukaan, 452 unit pancing tonda dan 16 unit sarana penangkapan ikan - serta pada penyediaan data statistik perikanan tangkap. Data ini sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan program <p>b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kapasitas nelayan kecil melalui bimtek kecakapan nelayan untuk 30 orang nelayan serta pendampingan dan pembinaan serta penguatan kelembagaan nelayan <p>c. Kegiatan Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota, yang menitikberatkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan nelayan untuk pengurusan kelengkapan berkas penerbitan tanda daftar kapal perikanan

2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan budidaya sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 27. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.500,00	13.681,58	101,35

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan budidaya Kota Jayapura tahun 2023 (13.681,58 ton) telah melebihi target yang ditetapkan yakni 13.500 ton. Capaian kinerja produksi budidaya tahun 2023 yang mencapai 101,35 persen atau dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Dan jika dibandingkan tahun sebelumnya, laju peningkatan produksi budidaya tahun 2023 meningkat 9,54 %.

Peningkatan produksi budidaya tahun 2023, masih didominasi oleh Jenis ikan Bandeng (61,57 %), ikan Nila (35,80 %), dan ikan Mas (2,07 %), sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 28. Produksi Perikanan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023 menurut Jenis ikan

No.	JENIS IKAN YANG DIBUDIDAYAKAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1	Nila	4.898,39
2	Mas	282,99
3	Lele	51,95
4	Bandeng	8.423,44
5	Udang	22,42
6	Nila Salin	0,63
7	Kakap	0,95
8	Bubara	0,65
9	Cumi	0,16
JUMLAH		13.681,58

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan budidaya antara tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI	
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12.738,80	13.500,00	12.491,00	13.681,58

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 2 (dua), peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Tahun 2022 persentase capaian kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan

budidaya hanya mencapai 98,05%, dan pada tahun 2023 persentase capaian kinerjanya mencapai 101,35 persen. Dan jika dilihat dari perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis komoditinya, produksi ikan nila pada tahun 2023 meningkat signifikan sebesar 305,94% dari tahun sebelumnya. Sedang jenis ikan bandeng dan ikan mas mengalami penurunan.

Tabel 30. Perbandingan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah dan Jenis Ikan

NO.	JENIS IKAN	PRODUKSI	
		2022	2023
1	Nila	1.601,08	4.898,39
2	Mas	355,11	282,99
3	Lele	6,40	51,95
4	Bandeng	10.524,52	8.423,44
5	Udang	-	22,42
6	Nila Salin	-	0,63
7	Kakap	1,10	0,95
8	Bubara	1,07	0,65
9	Cumi	-	0,16
10	Kerapu	0,60	0
JUMLAH		12.489,88	13.681,58

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 dan akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan budidaya Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.909,06	13.681,58	98,36

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada tahun 2023 hasil produksi perikanan budidaya hampir mencapai jumlah target akhir Renstra Dinas Perikanan tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 Dan Target Nasional Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET NASIONAL TAHUN 2023	KETERANGAN
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.681,58	21.580.000,00	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi perikanan budidaya Kota Jayapura menyumbang 0,06% dari total produksi perikanan budidaya nasional yang masih didominasi oleh jenis produksi rumput laut.

Namun jika dibandingkan dengan target produksi perikanan budidaya Provinsi Papua tahun 2023 (30.000 ton), jumlah produksi perikanan budidaya Kota Jayapura tahun 2023 menyumbang 45,60% dari jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Papua.

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 2 (dua) Dinas Perikanan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	101,35	99,810	1,540

Pada tahun 2023, target anggaran yang digunakan dalam rangka pembangunan perikanan budidaya di Kota Jayapura adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 3.802.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.795.777.728,00 (99,81%), dengan sisa anggaran Rp. 7.207.272,00 (0,19%).

Dengan demikian, berdasarkan data di atas diketahui bahwa prosentase capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 adalah 101,35 % dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,81 %. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya sudah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,54 %.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.500,00	13.684,00	Faktor utama pendukung peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah penambahan luas lahan budidaya ikan dan alih fungsi lahan (sawah) menjadi kolam ikan.
			Faktor lain adalah karena adanya bantuan hibah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya kepada para pembudidaya seperti pembuatan kolam bak terpal, serta pemberian bantuan pakan dan benih serta sarana pendukung usaha budidaya lainnya
			Dukungan Pemerintah Pusat (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) melalui Program Kampung Budidaya yang disertai bantuan hibah exavator, motor roda tiga, dan sarana budidaya lainnya.
			Ketersediaan benih ikan unggul baik dari UPR maupun BBIL Kota. Jumlah produksi benih tahun 2023 (3.722.000 ekor) yang meningkat hingga 138,25% dari tahun sebelumnya (2.692.200 ekor) sangat mendukung peningkatan produksi budidaya ikan
			Kegiatan Pelatihan, Pendampingan dan bimbingan serta monitoring bantuan hibah yang dilakukan secara kontinyu juga ikut mempengaruhi peningkatan jumlah produksi

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Analisis program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Perikanan budidaya, adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 35. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG/PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.500,00	13.684,00	<p>Pencapaian sasaran kinerja 2) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang kemudian dijabarkan dalam 3 kegiatan :</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kegiatan ini selain dititikberatkan pada peningkatan produksi benih juga pada pengembangan kapasitas unit perbenihan ikan guna menunjang produktifitas usaha budidaya, dengan capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditentukan</p> <p>b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini selain menitikberatkan pada peningkatan sarana pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan jumlah produksi budidaya, seperti pemberian bantuan hibah 4 unit kolam bak terpal, 4 unit pompa alkon, 5 paket sarana budidaya air payau dan 12 paket sarana budidaya air tawar. Selain kegiatan di atas, kegiatan ini juga menitikberatkan pada pembinaan dan pendampingan bagi 30 orang pembudidaya ikan serta penyediaan data statistik yang menunjang proses perencanaan dan evaluasi program kegiatan, dimana seluruh kegiatan-kegiatan ini telah mencapai 100% dari target yang di tentukan</p>

3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.045,12	2.385,15	228,22

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi olahan hasil perikanan Kota Jayapura tahun 2023 (2.385,15 ton) telah melebihi target yang ditetapkan yakni 1.045,12 ton, bahkan terealisasi lebih dari 100%, dimana Capaian kinerja produksi olahan hasil perikanan tahun 2023 mencapai 228,22 persen atau dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Dan jika dibandingkan tahun sebelumnya, laju peningkatan produksi olahan hasil perikanan tahun 2023 meningkat 103,07 % dari tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi olahan hasil perikanan tahun 2023, masih didominasi oleh Jenis produk olahan tuna loin dan ikan asap sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 37 Jenis dan jumlah olahan produk hasil perikanan di Kota Jayapura tahun 2023

NO	JENIS PRODUK	JUMLAH PENGOLAH	JUMLAH PRODUKSI		
			(kg)	(ton)	
1.	Pengasapan/Pemanggang	51	616.024,41	616,024	
	- Ekor Kuning		326.333,07	326,333	
	- Cakalang		277.145,54	277,146	
	- Deho		12.545,80	12,546	
2.	Tuna Loin	3	1.766.206,97	1.766,207	
3.	Pengolahan Lainnya		2.798,62	2,799	
	Abon Ikan		4	937,82	0,938
	Rendang Tuna		1	1.061,90	1,062
	Sambal Ikan Roa		1	798,90	0,799
4.	Ikan Asin	0	-	0	
5.	Pelumatan Ikan / Surimi		115	0,115	
	- Mpek-Mpek Ikan		1	115	0,115
TOTAL		61	2.385.145,00	2.385,145	

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2023

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi olahan hasil perikanan antara tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI	
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.015,00	1.045,12	1.174,53	2.385,15

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3 (tiga), peningkatan produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2023 terus

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Tahun 2022 persentase capaian kinerja sasaran peningkatan produksi olahan hasil perikanan mencapai 115,72 %, dan pada tahun 2023 persentase capaian kinerjanya meningkat mencapai 228,22 persen. Dan jika dilihat pada tabel berikut, terlihat bahwa peningkatan jumlah produksi olahan pada tahun 2023 sangat signifikan pada jenis olahan Tuna Loin.

Tabel 39. Perbandingan Jumlah dan jenis Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	JENIS PRODUK OLAHAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	
		2022	2023
1	Ikan Asar (Ekor Kuning, Cakalang, Tongkol)	636,21	616,02
2	Olahan Bandeng (bandeng presto, bandeng tanpa duri, abon)	0,83	-
3	Olahan Tenggiri (mpek-mpek, bakso ikan)	0,43	0,12
4	Olahan Tuna (Tuna Loin)	537,05	1.766,21
5	Jenis Olahan Lainnya (sambal, rendang, abon)	-	2,80
JUMLAH		1.174,53	2.385,15

Jika pada tahun 2022 jumlah produksi Tuna Loin sebesar 537,05 ton, pada tahun 2023 jenis produk olahan ini meningkat pesat menjadi 1.776,21 ton. Disisi lain ada jenis produk olahan yang sudah tidak diproduksi lagi di tahun 2023 yaitu olahan bandeng baik itu bandeng presto maupun bandeng tanpa duri.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Realisasi kinerja sasaran strategis peningkatan produksi olahan hasil perikanan tahun 2023 dan akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.209,85	2.385,15	197,14

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada tahun 2023 hasil produksi olahan perikanan telah melebihi jumlah target akhir Renstra Dinas Perikanan tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional**

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi olahan hasil perikanan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023 Dan Target Nasional Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET NASIONAL TAHUN 2023	KETERANGAN
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	2.385,15	7.350.000,00	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi olahan hasil perikanan Kota Jayapura menyumbang 0,03% dari total produksi olahan hasil perikanan nasional.

Namun jika dibandingkan dengan target produksi olahan hasil perikanan Provinsi Papua tahun 2023 (6.500 ton), jumlah produksi olahan hasil perikanan Kota Jayapura tahun 2023 menyumbang 36,69 % dari jumlah produksi olahan hasil perikanan Provinsi Papua.

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 3 (tiga) Dinas Perikanan - Peningkatan Produksi Olahan Hasil perikanan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 42. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	208,22	99,950	108,270

Pada tahun 2023, target anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran yang mendukung peningkatan jumlah produksi olahan hasil perikanan di Kota Jayapura adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.515.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.514.281.000,00 (99,95%), dengan sisa anggaran Rp. 718.472,00 (0,05%).

Jika demikian, berdasarkan data di atas diketahui bahwa prosentase capaian kinerja sasaran strategis peningkatan produksi olahan hasil perikanan budidaya tahun 2023 adalah 208,22 % dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,95 %. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja sasaran peningkatan produksi olahan hasil perikanan sangat efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 108,270 %.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja peningkatan produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.045,12	2.385,15	Melimpahnya produksi tuna dari Bulan Juli sampai Oktober 2023 sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi olahan Tuna. Peningkatan jumlah olahan Jenis Tuna Loin cukup signifikan, yakni 230,42% dari tahun 2022. Jika pada tahun 2022 jumlah produksi olahan Tuna Loin adalah 534,513 ton, pada tahun 2023 meningkat signifikan sebesar 1.766,207 ton. Berdirinya PT. ChenWoo Fishery di Kota Jayapura (Koya Tengah, Distrik Muara Tami) yang memiliki ABF dengan kapasitas 30 ton dan Coldstorage berdaya tampung 250 ton, atau kapasitas maksimum bulanan bisa mencapai 7.500 ton turut andil dalam peningkatan jumlah produksi olahan tuna ini. Kontribusi PT. ChenWoo Fishery dalam jumlah produksi olahan Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebesar 1.343,53 ton, atau sebesar 56,32 % dari total jumlah produksi olahan. Selain produsen Tuna Loin, ada 3 (tiga) distributor besar lainnya yang meningkat produksinya (PT. Awal Armada Tuna Papua, CV. Bidara dan H. Mursidi) yang melakukan pengiriman produk olahan tuna segar beku utuh.
			untuk jenis olahan ikan asar, capaian realisasi produksi tahun 2023 menurun atau hanya mencapai 96,83% dari total produksi olahan ikan asar tahun 2022. Hal ini disebabkan ada beberapa pengolah ikan asar yang tidak berproduksi lagi karena kesulitan pemasaran, kondisi kesehatan maupun kesulitan modal. Serta sulitnya pengolah ikan asar menerapkan penjualan/pemasaran secara online.
			Kegiatan Pendampingan dan bimbingan serta monitoring bantuan hibah yang dilakukan secara kontinyu juga ikut mempengaruhi peningkatan jumlah produksi

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan

Analisis program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan, adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 44. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG/PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.045,12	2.385,15	<p>Pencapaian sasaran kinerja 3) Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dijabarkan dalam 3 kegiatan :</p> <p>a. Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitik beratkan pada kegiatan pemberdayaan para pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui pemberian bantuan hibah sarana dan prasarana produksi pengolahan dan pemasaran berupa 3 unit bangsal pengolahan, 60 unit coolbox 35 ltr, untuk meningkatkan produksi dan daya jual hasil usaha pengolahan dan pemasaran hasil 10 unit tenda pemasaran, 6 unit vacuum sealer, dan kemasan 6.600 lembar yang diberikan kepada 56 pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dimana pada tahun ini terealisasi 100% sesuai target yang telah ditentukan.</p> <p>b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan ini menitikberatkan selain pada upaya peningkatan kapasitas para pengolah hasil perikanan dalam meningkatkan mutu hasil olahan, melalui pembinaan dan pendampingan juga sosialisasi penerapan standar kelayakan pengolahan (SKP) bagi 36 unit pengolahan ikan, selain itu juga dititikberatkan pada pemantauan mutu hasil perikanan yang beredar di pasar baik tradisional maupun retail yang terealisasi 100%.</p> <p>c. Kegiatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada penyiapan logistik produk perikanan untuk kepentingan pemenuhan konsumsi masyarakat Kota Jayapura, dan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.</p> <p>d. Kegiatan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil. Kegiatan ini menitikberatkan pada penyediaan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Data ini sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan, terealisasi 100%.</p>

4) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi suatu kewajiban bagi seluruh perangkat daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SKM di Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan salah satu Tujuan Strategis Pemerintah Kota Jayapura yakni meningkatnya pelayanan public di Kota Jayapura, maka Dinas Perikanan sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan public kepada masyarakat perikanan melaksanakan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka menggali informasi tentang kepuasan masyarakat pelaku usaha perikanan atas layanan yang diberikan (pelayanan rekomendasi BBM, dan pelayanan kartu pelaku usaha perikanan/e KUSUKA) dan juga dalam mendapatkan masukan/saran untuk perbaikan/peningkatan layanan yang diberikan. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan Kota Jayapura adalah menyangkut (1) Persyaratan, (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, (3) Waktu Penyelesaian, (4) Biaya/tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan serta (9) Sarana dan Prasarana.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi SPBN Nelayan pada waktu layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Data yang diperoleh dari kuisisioner selanjutnya diolah dengan metode tertentu sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan gambaran dari kinerja layanan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Jayapura.

Hasil pengukuran sasaran meningkatnya layanan prima bagi masyarakat khususnya masyarakat perikanan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

a. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 45. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	81,00	101,25

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas perikanan Kota Jayapura tahun 2023 (81) telah melebihi target yang ditetapkan yakni 80. Capaian kinerja meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat tahun 2023 mencapai 81 atau dengan kategori **SANGAT TINGGI**.

b. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Masyarakat bagi Masyarakat baru dimunculkan setelah Periode Renstra 2023-2026, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura 2023-2026. Pada periode renstra sebelumnya (Periode 2018-2022) sasaran strategis ini belum diangkat sebagai indikator kinerja utama.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat tahun 2023 dan akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	81,00	97,59

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada tahun 2023 pelayanan publik yang diberikan Dinas Perikanan kepada pelaku usaha perikanan mengalami tingkat kemajuan 97,59 dari jumlah target akhir Renstra Dinas Perikanan tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 4 (empat) Dinas Perikanan - Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 47. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	98,140	1,860

Pada tahun 2023, target anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan seluruh program/kegiatan pada dinas perikanan yang mengacu pada terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat perikanan adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 14.844.032.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.568.365.050,00 (98,14%), dengan sisa anggaran Rp. 275.666.950,00 (1,86%).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat sudah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,86%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 48. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	81,00	Secara umum mutu pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan Kota Jayapura dalam pelayanan rekomendasi baik rekomendasi BBM maupun kartu e KUSUKA, dipersepsikan BAIK oleh pengguna layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81 (kisaran nilai baik pada interval 76,61 - 88,30). Dan Unsur pelayanan yang dianggap memuaskan oleh responden adalah Unsur layanan. Hal ini disebabkan petugas pelayanan publik dituntut untuk melayani masyarakat perikanan dengan senyum, sopan, ramah serta tidak diskriminasi. Serta Blaya/tarif yang tidak dipungut. Dari sisi penyampaian prosedur layanan dinilai sangat mudah karena sudah ada kerjasama yang terbangun baik antara Dinas Perikanan dengan PT. Pertamina Wilayah Papua dan juga dengan SPBN yang melayani pengguna layanan secara langsung dilapangan. Dari sisi kompetensi petugas dinilai sudah kompeten dalam memberikan pelayanan. Namun jika dilihat dari hasil survey terhadap pelayanan publik, unsur pelayanan yang dianggap kurang memuaskan adalah waktu pelayanan. Waktu layanan sangat tergantung pada kesiapan persyaratan yang disiapkan oleh pengguna layanan. Jika persyaratan lengkap waktu layanan akan semakin singkat.

f. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat**

Analisis program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 49. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG/PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2023 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Kota Jayapura semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, khususnya kepada masyarakat pelaku usaha perikanan tahun 2023.

3.2. **Realisasi Anggaran**

Pencapaian target kinerja tahun 2023 dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Jayapura melalui 4 program, 8 kegiatan, dan 13 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi struktur program dan kegiatan serta dukungan anggaran terkait langsung dan tidak langsung pencapaian sasaran strategis (1-4) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 3.25.0.00.0.00.02.00/DPPA-OPD/KOTA-JPR/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 50. Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Dinas Perikanan Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN			LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap tahun n	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	43.500 Ton	46.369,70	106,60	4.955.015.000,00	4.736.109.330,00	95,58		Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1. Meningkatnya Rumah Tangga Nelayan Yang melakukan Pengelolaan Usaha Penangkapan dan Diversifikasi Usaha	Jumlah RTN yang melakukan pengelolaan penangkapan ikan				4.855.015.000,00	4.636.109.330,00	95,49		Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
1.1 Meningkatnya ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (data produksi, jumlah nelayan, armada dan alat tangkap)	5 laporan	5 laporan	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kasie. Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.PI)
1.2 Meningkatnya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya prasarana usaha perikanan tangkap yang memenuhi standar mutu	46 unit	45 Unit	97,83	3.128.853.000,00	3.125.342.280,00	99,89	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmiika I, S.PI)
1.3 Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah bantuan sarana usaha perikanan tangkap	607 unit	991 Unit	163,26	1.463.162.000,00	1.460.767.050,00	99,84	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kasie Sarpras Perikanan Tangkap (Wasmiika I, S.PI)
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kabupaten/Kota					50.000.000,00	50.000.000,00	100,00		Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	a. Jumlah kelompok nelayan yang terbentuk	7 kelompok	3 kelompok	42,86	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kasie Kenelayanan (Uhon Banti, S.PI)
	b. Jumlah nelayan yang memiliki sertifikasi kecakapan nelayan	30 nelayan	30 nelayan	100,00					
	c. Jumlah KUSUKA yang diterbitkan	200 Kartu	214 kartu	107,00					
	d. Jumlah Rekomendasi BBM yang diterbitkan	169 Rekomendasi	239 Rekomendasi	141,42					
3. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT					50.000.000,00	50.000.000,00	100,00		Kabid. Perikanan Tangkap (Borong, SH)
3.1 Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	10 dokumen	20 dokumen	200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami	Kasie Pengelolaan SDI (Yermias Asyopder, S.PI)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN			LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.370,49 Ton	13681,58 Ton	102,3267	3.802.985.000,00	3.795.777.728	99,81		
1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil					50.000.000,00	49.320.158,00	98,64		Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.Pi)
1.1 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah UPR terbina	14 UPR	14 UPR	100,00	50.000.000,00	49.320.158,00	98,64	Distrik Muara Tami, Jayapura Selatan, Abepura, Heram	Ka. UPTD BBIL (Herman Koyari, S.Pi)
	Jumlah produksi benih ikan	150.000 benih	157.000 benih	104,67					
	Jumlah produksi calon	6 paket	0 paket	0					
2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					3.752.985.000,00	3.746.457.570,00	99,83		Kabid. Perikanan Budidaya (Yeni Wambukomo, S.Pi)
1.3 Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data statistik perikanan budidaya (data produksi pembesaran, jumlah pembudidaya, luas lahan dan produksi benih ikan air tawar)	5 laporan	5 laporan	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Distrik Muara Tami, Jayapura Selatan, Abepura, Heram	Kasie Produksi Budidaya (Topyy Merahabia, S.Pi)
1.4 Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	22	38 unit	172,73	3.667.985.000,00	3.661.457.570	99,82	Distrik Muara Tami, Jayapura Selatan, Abepura, Heram	Kasie Sarpras Perikanan Budidaya (Agustinus Abisay, S.Pi)
1.5 Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah pembinaan, pemantauan dan monitoring usaha pembudidayaan ikan	30 kali	30 kali	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Distrik Muara Tami, Jayapura Selatan, Abepura, Heram	Kasie Pembinaan Usaha Budidaya Perikanan (Mersiana Mebri, A.Md.Pi)
	Jumlah kelompok yang terbentuk	3 kelompok	7 kelompok	233,33					
	Jumlah kelompok yang terlatih	5 kelompok	3 kelompok	60					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN			LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	1.045,12 Ton	2.385,15 Ton	228,22	1.515.000.000,00	1.514.281.528,00	99,95	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kabid POSPP (M. Agussalim, S.Pi)
	Jumlah Angka konsumsi ikan Masyarakat Kota Jayapura	44 kg/kapita/thn	46,46 kg/kapita/thn	105,59					
1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Mikro dan Kecil					35.000.000,00	35.000.000,00	100		Kabid POSPP (M. Agussalim, S.Pi)
1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 Perikanan	a. Jumlah laporan data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	26 laporan	26 laporan	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram	Kasie Akses Pasar dan Promosi Hasil Perikanan
	b. Jumlah promosi GEMARAKAN	3 kali	3 kali	100					
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					80.000.000,00	80.000.000,00	100		Kabid POSPP (M. Agussalim, S.Pi)
1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	a. Jumlah pengendalian mutu produk perikanan	1 kali	1 kali	100,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kasie Bina Mutu (Alfariz, P, S.Pi)
	b. Jumlah UPI yang dibina	36 UPI	36 UPI	100					
	c. Jumlah UPI tersertifikasi	6 UPI	6 UPI	100					
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.400.000.000,00	1.399.281.528,00	99,95		Kabid POSPP (M. Agussalim, S.Pi)
1.3 Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah bantuan sarana pengolahan bagi UPI	66 unit	66 unit	100,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Kabid POSPP (M. Agussalim, S.Pi)
	b. Jumlah UPI penerima bantuan prasarana pengolahan sesuai standar	3 UPI	3 UPI	100,00					
1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	a. Fasilitas logistik hasil perikanan	20 Ton	20,20 Ton	101,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100	Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami	Ka. UPTD Outlet P2HP (Stenly, S.ST.Pi)
	b. Jumlah pelaksanaan paras murah dalam rangka pengendalian inflasi	20 kali	20 kali	100					

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN			KETERANGAN
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72	76,55	106,32	4.784.032.000,00	4.572.196.464,00	94,53	Realisasi SAKIP Tahun 2022 (tahun 2023 btm di evaluasi)
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan yang optimal							
1.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	39 orang	39 orang	100	4.225.932.000,00	3.968.062.176,00	93,90	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian							
2.1 Pengadaan pakaian dinas	Jumlah paket pakaian dinas PNS lengkap dengan atribut	35 Paket	35 Paket	100	12.495.000,00	12.495.000,00	100	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum yang optimal							
3.1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	29.292.000,00	29.292.000,00	100	
3.2 penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	100	205.675.000,00	205.675.000,00	100	
3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	3 paket	3 paket	100	23.684.200,00	23.684.200,00	100	
3.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 paket	1 paket	100	3.000.000,00	3.000.000,00	100	
3.5 Penyediaan bahan/bahan material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 paket	1 paket	100	2.576.000,00	2.576.000,00	100	
3.6 Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah paket konsumsi fasilitas kunjungan tamu	180 paket	180 paket	100	50.245.000,00	50.245.000,00	100	
3.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	5 laporan	5 laporan	100	140.568.000,00	140.559.800,00	99,99	
4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran							
4.1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	2 paket	2 paket	100	21.234.000,00	17.277.288,00	81,37	
4.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	3 orang	3 orang	100	67.950.000,00	67.950.000,00	100	
5. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.1 Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah service peralatan dan mesin kantor	2 kali	2 kali	100	1.380.000,00	1.380.000,00	100	

Tabel diatas, menggambarkan bahwa seluruh program dan kegiatan sektor perikanan telah memanfaatkan anggaran APBD Tahun 2023 untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.14.568.365.050,00 atau mencapai 99,14 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.844.032.000,00

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan (utama) adalah 99,91%, sedangkan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pendukung sebesar 94,53%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar adalah pada program/kegiatan/sub kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (99,95%) Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan/sub kegiatan penunjang (Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sebesar 94,53 %.

Dari Pagu anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Dinas Perikanan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 275.666.950,00 atau terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,86 %. Efisiensi anggaran tersebut berasal dari sub kegiatan:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan pegawai (Selisih pembayaran gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 257.869.824,00
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Selisih pembayaran tiket pesawat) sebesar Rp. 9.000,00
- c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (selisih pembayaran rekening listrik BBIL sebesar Rp. 1.667.012,00 dan selisih pembayaran internet sebesar Rp. 2.289.700,00)
- d. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap (selisih kontrak/dana mati) sebesar Rp. 3.510.720,00
- e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap (selisih kontrak/dana mati) sebesar Rp. 2.394.950,00\
- f. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (sisa pembayarn rekening listrik UPTD) sebesar Rp. 679.842.000,00
- g. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (selisih kontrak/dana mati) sebesar Rp. 6.527.430,00
- h. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (selisih kontrak/dana mati) sebesar 718.472,00

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Jayapura menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Capaian indikator sasaran strategis Pertama, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan, Tangkap terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan nilai 106,60 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap terutama jenis ikan Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC) di tahun 2023 terutama sangat dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino yang terjadi dari Bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023. Fenomena El Nino membuat hasil tangkapan ikan nelayan melimpah di musim kemarau, hasil tangkapan mencapai dua kali tangkapan normal. Hal ini disebabkan pengaruh El Nino membuat suhu permukaan air laut di sekitar Papua menurun yang berakibat kurangnya pembentukan awan maka membuat curah hujan pun menurun, namun kandungan klorofil di laut meningkat. Faktor lain yang mendukung peningkatan produksi tangkap adalah adanya bantuan hibah kepada nelayan baik bantuan sarana maupun prasarana tangkap juga kegiatan Pelatihan, Pendampingan dan bimbingan serta monitoring bantuan hibah yang dilakukan secara kontinyu. Kemudahan akses yang diberikan kepada nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak melalui pemberian surat rekomendasi per nelayan untuk memenuhi kebutuhan melaut juga sangat mempengaruhi produktivitas nelayan.

Capaian indikator sasaran strategis Ke-dua, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan, Budidaya terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan nilai 101,35 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Peningkatan jumlah produksi budidaya tahun 2023, utamanya karena selain adanya bantuan hibah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, pelatihan dan pendampingan dan peningkatan areal lahan budidaya seluas 59 Ha serta Suplay air yang cukup lancar ke areal budidaya sangat mempengaruhi kenaikan jumlah produksi.

Capaian indikator sasaran strategis Ke-tiga, yaitu Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan terdapat 1 indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan nilai 228,22 % atau interpretasi SANGAT TINGGI.

Melimpahnya produksi ikan jenis tuna dari Bulan Juli sampai Oktober 2023 sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi olahan tuna baik tuna loin maupun tuna utuh segar beku. Peningkatan jumlah produk olahan tuna khususnya olahan jenis Tuna Loin cukup signifikan, yakni 230,42% dari tahun 2022. Kontribusi beberapa perusahaan olahan tuna (PT. Chen Woo Fishery, PT. Awal Armada Tuna Papua, CV. Bidara) sangat mempengaruhi peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan. Bantuan hibah yang diberikan kepada para pengolah ikan asli Papua juga sangat mempengaruhi jumlah produksi olahan ikan asar (25,83%).

Capaian indikator sasaran strategis Ke-empat, yaitu Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan masyarakat dengan nilai 81 % atau Nilai BAIK dengan interpretasi SANGAT TINGGI

Secara umum mutu pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan Kota Jayapura dalam pelayanan rekomendasi baik rekomendasi BBM maupun kartu e KUSUKA, dipersepsikan BAIK oleh pengguna layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81 (kisaran nilai baik pada interval 76,61 - 88,30). Unsur pelayanan yang dianggap memuaskan oleh responden adalah Unsur layanan. Sedang unsur pelayanan yang dianggap kurang memuaskan adalah waktu pelayanan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian keempat sasaran strategis tersebut, Indikator Kinerja Utama 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Bahkan sasaran strategis satu, dua dan tiga telah melampaui target Renstra 2023-2026.

Realisasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut ;

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 1 (Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap) adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pagu Rp. 4.742.015.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.736.109.330,00 (99,88%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2 (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya) adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pagu Rp. 3.802.985.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.795.777.728, 00 (99,81%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 3 (Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan) adalah Program Pengolahan Dan pemasaran Hasil Perikanan, Pagu Rp. 1.515.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.514.281.528,00 (99,95%)

Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 4 (Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat) adalah Seluruh program/kegiatan pencapaian sasaran 1,2 dan 3 ditambah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Pagu Rp. 558.100.000,00 Realisasi Rp. 554.134.288,00 atau 99,29%) Pagu Rp. 10.618.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.600.302.874,00 (99,83%)

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah maupun kualitas bantuan hibah sarana dan prasarana perikanan, baik kepada pelaku usaha penangkapan ikan, budidaya maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan;
2. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan perikanan.
3. Meningkatkan jumlah nelayan yang bersertifikasi kecakapan nelayan, pembudidaya yang bersertifikasi CPIB dan CBIB serta pengolah hasil perikanan yang bersertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).
4. Membuka dan memperluas jejaring pemasaran hasil perikanan.
5. Meningkatkan mutu pelayanan dengan memperpendek waktu layanan.
Meningkat waktu layanan sangat tergantung pada kesiapan persyaratan yang disiapkan oleh pengguna layanan. Dimana jika persyaratan lengkap waktu layanan akan semakin singkat, maka sosialisasi kepada pengguna layanan harus ditingkatkan.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya penunjang keberhasilan program/kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Jayapura ini disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2023 kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun sektor perikanan di Kota Jayapura.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PERIKANAN

JLN. Balai Kota No. 1 Entrop, Gedung Otonom Lantai 2, Jayapura, Kode Pos 99224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

NOMOR : 523/237/V/VI/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASSI (PLID)

PELAKSANA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perikanan Kota Jayapura telah ditetapkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik menuju pelayanan yang cepat, mudah, wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pelaksana Dinas Perikanan Kota Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perikanan Kota Jayapura;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2008 2019 Tentang Organissi dan Dinas- dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura;

15. Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PLID) Pelaksana Dinas Perikanan Kota Jayapura
- KEDUA : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
- KETIGA : Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada PLID Utama Perikanan Kota Jayapura
- KELIMA : PLID Pelaksana Dinas Perikanan Kota Jayapura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kota Jayapura
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Jayapura

Pada tanggal : 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua.

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura

Nomor : 523/2571/VI/2024

Tanggal : 2024

STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA
DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

Nomor : 525/2371/VI/2024

Tanggal : 2024

URAIAN TUGAS
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 PADA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	Pengelola Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PLID Utama; d. Memberikan lapiran tentang pengelolaan informasi kepada PLID Pembantu secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta - Informasi yang wajib tersedia setiap saat - Informasi yang dikecualikan
2	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh Masyarakat b. Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat c. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik d. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi sengketa informasi publik
3	Pendokumentasian dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA


MATHEYS SIBI, S.ST.Pi, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19770131 200212 1006



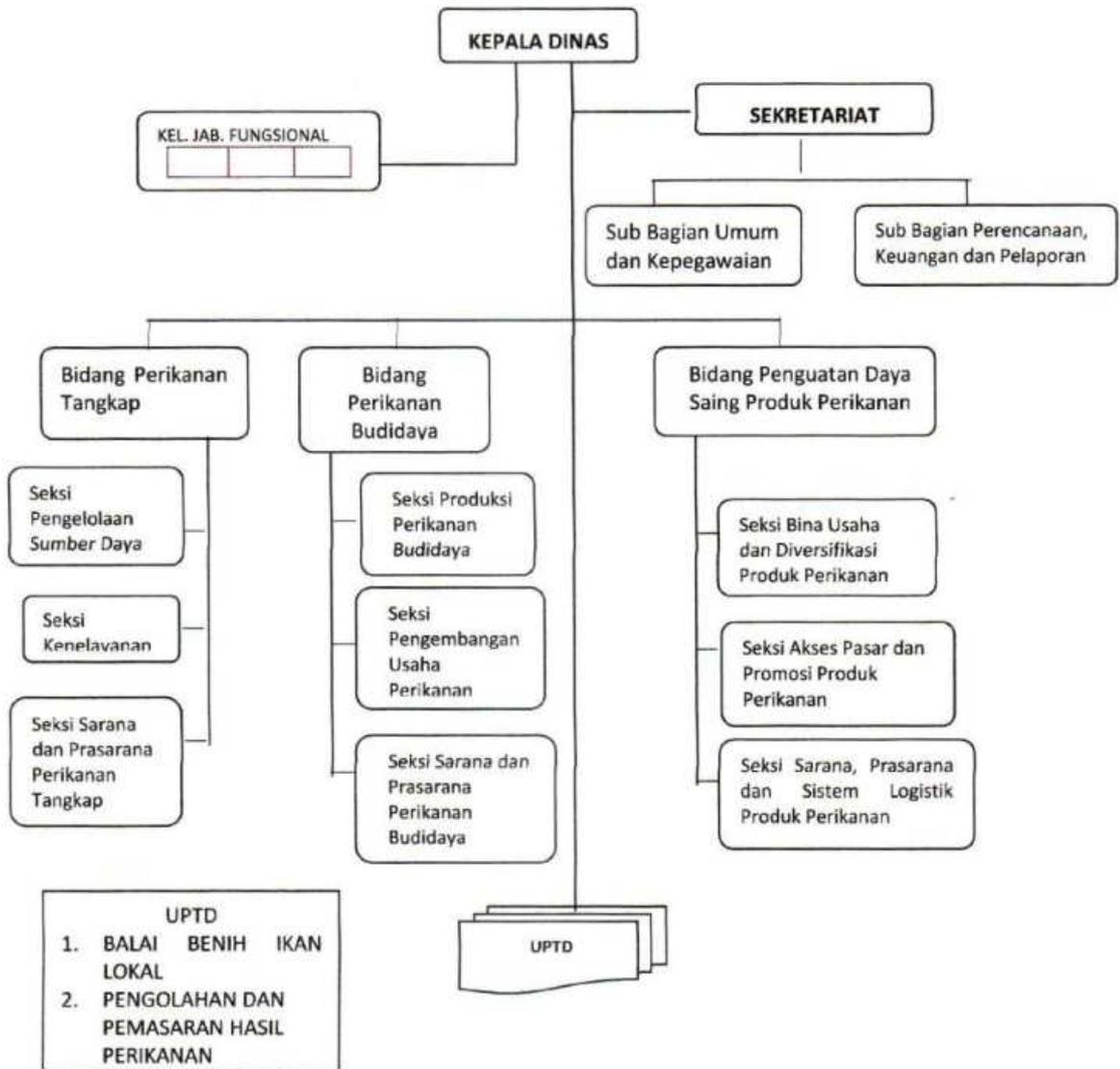
DINAS PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI



TAHUN 2024

STRUKTUR ORAGANISASI DINAS PERIKANAN
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016



JAYAPURA, JANUARI 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA



MATHEYS. SIBI, S.ST.PI, M.Si

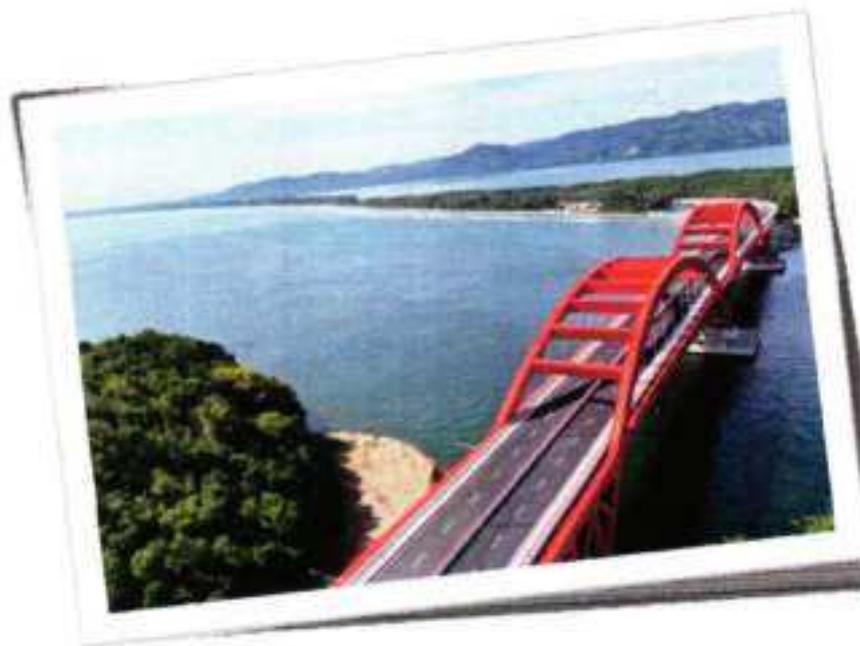
PEMBINA TK.I

NIP. 19770131 200212 1006



DINAS PERIKANAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI



TAHUN 2024

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN

Dinas Perikanan Kota Jayapura merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Perikanan khususnya dalam wilayah Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Perikanan seperti yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jayapura nomor 31 Tahun 2016 tersebut adalah:

1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi dibidang perikanan;
3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perikanan;
4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang perikanan;
5. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan;
6. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya perikanan;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan;
8. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Perikanan Kota Jayapura, sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

1. Tugas

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan dinas.

2. Fungsi

- a) Pengelolaan urusan administrasi umum;
- b) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c) Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d) Pengelolaan urusan perlengkapan; dan
- e) Pengelolaan perencanaan dan pelaporan dinas.

3. Tugas Sub-Sub Bagian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a) Melaksanakan administrasi keuangan dan asset, meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset.

b) Menghimpun rencana program dan kegiatan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan informasi pembangunan perikanan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

b. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

1. Tugas

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di Bidang Perikanan Tangkap.

2. Fungsi

a) Penyusunan rencana, kriteria, prosedur pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkelanjutan, Pengembangan Kenelayanan, dan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

b) Penyusunan rencana, target, kriteria, dan prosedur pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkelanjutan, Pengembangan Kenelayanan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

c) Penyusunan rencana, kriteria, dan prosedur pelaksanaan penerapan aplikasi teknologi Perikanan Tangkap sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah dan komoditi sasaran;

d) Penyusunan kebutuhan, rencana, prosedur dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Perikanan Tangkap sesuai kebutuhan;

e) Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosedur pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Kenelayanan, serta Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap.

3. Tugas dan Fungsi Seksi – seksi

1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;

b. Melaksanakan penyediaan data dan informasi perikanan tangkap;

- c. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan tangkap;
- e. Melaksanakan pengendalian usaha perikanan tangkap;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi dan pemanfaatan sumber daya ikan;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan inventarisasi kondisi dan kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data statistik perikanan tangkap.
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan pemetaan waktu pergerakan ikan, serta pelaksanaan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan;
- d. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standart teknis; .
- e. Penyiapan bahan, penyusunan norma, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketentuan dan standart teknis;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sumberdaya Ikan.

2) Seksi Kenelayanan

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan penanganan masalah Kenelayanan;
- b. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi;
- c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia perikanan tangkap;
- d. Melaksanakan diversifikasi usaha nelayan;
- e. Melaksanakan fasilitasi jaminan usaha kenelayanan;
- f. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan perikanan tangkap;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan nelayan dan usahanya.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan

pengembangan usaha, kebutuhan pengembangan SDM, dan potensi pengembangan usaha perikanan tangkap.

- b. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM perikanan tangkap sesuai kebutuhan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan, dan sertifikasi usaha perikanan tangkap.
- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi usaha perikanan tangkap sesuai standart teknis.
- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kemitraan usaha perikanan tangkap.
- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan Jaminan Usaha Kenelayanan sesuai aturan yang berlaku.
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha dan diversifikasi usaha, sertifikasi dan kemitrausahaan usaha perikanan tangkap.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. Melaksanakan pengembangan armada, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, dan sarana penanganan hasil tangkapan di atas kapal;
- c. Menyiapkan prasarana penunjang perikanan tangkap;
- d. Melaksanakan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) sesuai standarisasi teknis;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan sarana prasarana perikanan tangkap dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan identifikasi kondisi dan kebutuhan pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan penunjang perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;
- b. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan

penunjang perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;

- c. Penyiapan bahan, penyusunan norma, kriteria, dan pelaksanaan bantuan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, prasarana penunjang perikanan tangkap, pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan penunjang perikanan tangkap;
- d. Penyiapan bahan, perumusan norma, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pengembangan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas pendukung, dan sistem pelayanan sesuai standarisasi teknis;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap, serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c. **BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA :**

1. **Tugas**

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di Bidang Perikanan Budidaya.

2. **Fungsi**

- a. Penyusunan rencana, kriteria, prosedur, dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi kebutuhan dan pengembangan Produksi Perikanan Budidaya, kebutuhan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, serta kebutuhan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di kawasan pengembangan;
- b. Penyusunan rencana, target, kriteria, prosedur, dan sasaran pelaksanaan pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Usaha, serta pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;
- c. Penyusunan rencana, kriteria, dan prosedur pelaksanaan penerapan aplikasi teknologi Perikanan Budidaya terbaru di kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah;
- d. Penyusunan kebutuhan, rencana, prosedur dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan;

- e. Penyusunan rencana, kriteria, perumusan standarisasi pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan Operasional UPTD Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Kota Jayapura;
 - f. Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosedur pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan Perkembangan Produksi, Pengembangan Usaha, dan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, serta perkembangan dan pelaksanaan UPTD BBIL.
3. Tugas Seksi – Seksi

1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan peningkatan produksi perikanan budidaya;
- b. Melaksanakan sistem dan prosedur peningkatan produksi Perikanan Budidaya;
- c. Melaksanakan penyediaan data dan informasi Perikanan Budidaya;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem perbenihan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. Melaksanakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi Budidaya ikan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan produksi perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan pengembangan dan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut, baik ikan konsumsi maupun ikan hias;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air payau dan laut, baik ikan konsumsi maupun ikan hias di kawasan pengembangan sesuai standart teknis;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- d. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan perbenihan ikan konsumsi dan ikan hias sesuai kebutuhan dan standart teknis;
- e. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan budidaya ikan dan pengendalian kesehatan ikan dan

lingkungannya di kawasan pengembangan budidaya perikanan;

- f. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan budidaya sesuai kebutuhan;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan produksi perikanan.

2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya baik pembesaran maupun perbenihan sesuai kebutuhan;
- b. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha budidaya ikan;
- d. Melaksanakan pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan, baik pembesaran maupun perbenihan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan perikanan budidaya;
- f. Melaksanakan pengendalian usaha budidaya;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha budidaya ikan, baik pembesaran maupun perbenihan.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan pengembangan usaha, kebutuhan pengembangan SDM, dan potensi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM perikanan budidaya sesuai kebutuhan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha budidaya ikan;
- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan unggulan daerah sesuai kebutuhan pasar dan standart teknis di kawasan pengembangan;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kemitrausahaan perikanan budidaya di kawasan pengembangan;

- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian usaha budidaya ikan;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha dan diversifikasi usaha, sertifikasi dan kemitrausahaan budidaya ikan.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana produksi perikanan budidaya, baik pembesaran maupun perbenihan di kawasan pengembangan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan pemanfaatan sarana prasarana produksi, serta perkembangan kawasan perikanan budidaya;

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pengembangan dan peningkatan produksi dan prasarana kawasan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana prasarana produksi dan prasarana kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan standart teknis;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana perikanan budidaya.

d. BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

1. Tugas

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana, kriteria, prosedur, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan, Promosi dan Akses Pasar, serta Sarana Prasarana dan Sistem Logistik Perikanan;
- b. Penyusunan rencana, terget, kriteria, dan prosedur pelaksanaan pengembangan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, serta pelaksanaan Pengawasan Peredaran Produk Perikanan;

- c. Penyusunan rencana dan prosedur peningkatan Promosi dan Perluasan Akses Pasar Produk Perikanan;
- d. Penyusunan rencana, kriteria, prosedur, dan melaksanakan Pengembangan SDM Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
- e. Penyusunan rencana, kriteria, dan perumusan standarisasi, serta melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan Operasional UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- f. Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosedur, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan, Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan, Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Sistem Logistik, serta perkembangan dan operasional UPTD P2HP.

3. Tugas Seksi – seksi

1) Seksi Bina Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi dan penyediaan data dan informasi pengolahan produk perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pembinaan dan pengembangan usaha dan produk olahan hasil perikanan;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu produk perikanan;
- d. Melaksanakan diversifikasi produk perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- e. Melaksanakan pengembangan SDM Pengolah produk perikanan;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan usaha dan diversifikasi produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi pengolahan produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengembangan usaha dan produk perikanan bernilai tambah;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu produk perikanan sesuai standart teknis;

- d. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi produk perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Pengolah produk perikanan;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan usaha dan diversifikasi produk perikanan.

2) Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan penyediaan data dan informasi pemasaran produk perikanan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, serta promosi produk perikanan;
- c. Melaksanakan penguatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- d. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan pemasaran produk perikanan;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kemasan dan labeling produk perikanan;
- f. Melaksanakan pengembangan SDM Pemasar produk perikanan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan akses pasar dan promosi produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan data, informasi pemasaran, dan pemetaan kebutuhan pasar produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penguatan dan perluasan jaringan pemasaran, serta produk perikanan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, prosedur, serta pelaksanaan kebijakan penguatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- d. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitrausahaan pemasaran produk perikanan;

- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kemasan dan labeling produk perikanan;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, serta pelaksanaan kebijakan pembinaan SDM Pemasaran produk perikanan;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan.

3) Seksi Sarana, Prasarana dan Sistem Logistik Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan Unit Pengolahan produk perikanan;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi sistem logistik produk perikanan;
- d. Melaksanakan *monitoring*, evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan identifikasi kondisi dan kebutuhan sarana prasarana dan sistem logistik produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan penyediaan, pengembangan, rehabilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Penyusunan bahan, perumusan, dan pelaksanaan penguatan sistem logistik produk perikanan;
- d. Penyiapan bahan, perumusan, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana produk perikanan.

e. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH

1. UPTD Balai Benih Ikan Lokal

Tugas :

Melaksanakan kebijakan Dinas Perikanan untuk pengembangan perbenihan ikan air tawar yang meliputi:

- a. Melaksanakan penyediaan calon induk PS sesuai kebutuhan;

- b. Menyediakan benih berkualitas untuk usaha budidaya, dan benih untuk kebutuhan stocking dan restocking;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan;
- d. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan calon induk ikan budidaya;
- e. Melaksanakan pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ikan air tawar;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) benih ikan yang didistribusi keluar daerah;
- g. Memfasilitasi sertifikasi benih dan usaha perbenihan ikan air tawar;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan SDM perbenihan ikan air tawar;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBIL

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan kebutuhan benih dan calon induk PS di kawasan pengembangan perikanan budidaya; *(baru)*
- b. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan manajemen perbenihan sesuai standart teknis dan kondisi BBIL; *(baru)*
- c. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan penyediaan dan peredaran Calon Induk dan benih unggul di kawasan pengembangan perikanan budidaya; serta benih ikan untuk stocking dan restocking; *(baru)*
- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan dan pakan ikan alternatif; *(baru)*
- e. Penyiapan bahan, perumusan dan melaksanakan pendampingan UPR ikan air tawar;
- f. Penyusunan bahan, rencana, dan memfasilitasi sertifikasi benih dan usaha perbenihan ikan air tawar;
- g. Penyiapan standart, kriteria, prosudur penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Calon Induk dan benih ikan yang di distribusikan keluar daerah; *(baru)*
- h. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pembinaan SDM perbenihan ikan air tawar. *(baru)*
- i. Penyiapan bahan dan rencana melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBIL.

2. UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan dinas terkait:

- a. Melaksanakan pengujian mutu produk perikanan;
- b. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang didistribusikan ke luar daerah;
- c. Melaksanakan ujicoba penerapan teknologi pengolahan produk perikanan tepat guna;
- d. Memfasilitasi pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. Memfasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran;
- f. Memfasilitasi pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar produk perikanan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, rumusan, dan standart pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan;
- b. Penyiapan standart, kriteria, prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang didistribusikan keluar daerah;
- c. Penyiapan bahan, rumusan, standart, dan pelaksanaan Ujicoba penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan tepat guna;
- d. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. Penyiapan bahan, rencana, serta memfasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran;
- f. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar hasil perikanan;
- g. Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

JAYAPURA, JANUARI 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA



MATHEYS. SIBI / S.ST.PI, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 19770131 200212 1006